



# newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 132, Juli 2020



|  |    |
|--|----|
| Ceramah Gubernur Jawa Barat kepada Peserta PPRA 61 .....   | 2  |
| Kepala BPPT: Indonesia Harus Melakukan <i>Innovation Driven Economy</i> .....                            | 3  |
| Komisi I DPR RI Apresiasi Kajian-kajian Lemhannas RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) .....             | 4  |
| Alissa Wahid Memberikan Ceramah Kepada Peserta PPRA 61 .....   | 5  |
| Agus Widjojo: Terus Bersikap Bijaksana dalam Menghadapi Situasi Pandemi Covid-19 .....                   | 6  |
| Diskusi Panel Penguatan Integritas Pemimpin dalam Kehidupan Nasional .....                               | 7  |
| Ketua Komnas HAM Memberikan Ceramah Kepada Peserta PPRA 60 .....   | 8  |
| Penandatanganan Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan SGPP .....  | 9  |
| Penyelenggaraan Penataran Istri Suami Peserta PPRA 60 Lemhannas RI Secara Virtual .....                  | 9  |
| Menteri PPN/Kepala Bappenas Memberikan Ceramah kepada Peserta PPRA 61 .....                              | 10 |
| Wakil Presiden RI Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin Beri Kuliah Umum Peserta PPRA 60 dan 61 Lemhannas RI ..... | 11 |

## Komisi I DPR RI Apresiasi Kajian-kajian Lemhannas RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)

# Ceramah Gubernur Jawa Barat kepada Peserta PPRA 61



**Birokrasi Dinamis, yaitu birokrasi yang mengajak semua elemen yang mencintai suatu daerah untuk berkolaborasi bersama-sama menjadi elemen dengan fungsi kebirokrasian.**

**Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.Ud**  
Gubernur Jawa Barat

**G**ubernur Jawa Barat (Jabar) Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.Ud memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, pada Senin (22/6) melalui *video conference*.

Pada ceramah yang mengangkat topik tentang "Kompetensi Birokrasi di Daerah dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0", Ridwan menyampaikan bahwa seorang individu harus selalu meningkatkan kemampuan diri agar dapat terus mengikuti perkembangan zaman.

Pada ceramahnya tersebut, Ridwan menjelaskan mengenai Birokrasi 1.0, Birokrasi 2.0, dan Birokrasi 3.0.. Birokrasi 1.0 adalah birokrasi pengaturan, yakni kegiatan hanya dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Dengan kata lain, jika tidak

ada aturan yang jelas, maka suatu kegiatan tidak bisa dilaksanakan sehingga birokrat tidak bisa melakukan inovasi. Selanjutnya adalah Birokrasi 2.0 atau birokrasi performa, yaitu birokrasi berdasarkan kinerja. Birokrasi 2.0 biasanya bersifat *reward and punishment*.

Sedangkan Birokrasi 3.0 adalah Birokrasi Dinamis, yaitu birokrasi yang mengajak semua elemen yang mencintai suatu daerah untuk berkolaborasi bersama-sama menjadi elemen dengan fungsi kebirokrasian. Jawa Barat sudah mulai melakukan kolaborasi tersebut dengan merangkul berbagai pihak, yaitu akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Pihak-pihak tersebut dirangkul sehingga seluruh dinas di Jabar memiliki penasihat sebagai pemberi masukan. "Kami meyakini di Jawa Barat sedang mencoba bergerak ke Birokrasi 3.0," ujar Ridwan.

"Pada dasarnya revolusi 4.0 tidak bisa dihindari. Jawa Barat menerjemahkan revolusi 4.0 ke dalam tiga fungsi dalam birokrasi yaitu mengontrol, mengobservasi dan mengkoneksi," tutur Ridwan. Mengontrol yang dimaksud adalah mengontrol birokrasi melalui aplikasi kinerja dinamis sehingga setiap birokrat harus membuat laporan beserta bukti melalui aplikasi yang akan mempengaruhi tunjangan yang diperoleh. Mengobservasi adalah melakukan pengamatan seperti pembacaan media sosial dan pembacaan data-data. Mengkoneksi adalah membuat pelayanan publik berbasis teknologi yakni seperti bayar pajak *online*, pendaftaran *online*, dan aplikasi RT dan RW yang bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur.

# Kepala BPPT: Indonesia Harus Melakukan *Innovation Driven Economy*

**K**epala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc, IPU memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, pada Selasa, (23/6). Pada kesempatan tersebut, Hammam mengangkat topik "Membangun Ekosistem Inovasi dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19".

Mengawali ceramahnya, Hammam mengajak seluruh peserta untuk melihat potret pembangunan teknologi Indonesia melalui posisi Indonesia di Indeks Inovasi Dunia tahun 2019 yang berada di peringkat 85. Dalam menentukan indeks inovasi dunia, indikator terpenting adalah investasi penelitian dan pengembangan, jumlah paten dan merek internasional yang dimiliki sebuah negara, serta ekspor produk teknologi tepat guna dan teknologi tinggi. Sedangkan, Indonesia masih kalah dalam ekspor produk teknologi tepat guna.

Menurut Hammam, Indonesia harus membawa ekonomi menjadi berbasis inovasi karena itu merupakan ciri negara maju. "Inovasi potret dari perkembangan teknologi kemudian menghasilkan inovasi dalam konteks kapasitas birokrasi," kata Hammam.

"Masalah yang dihadapi Indonesia adalah masih terjebak dalam *middle income trap*," ujar Hammam. Walaupun secara total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah berada diatas US\$ 1 Triliun, masalah *middle income trap* bukan sesuatu yang bisa ditepis. Rata-rata PDB Indonesia juga masih berada di angka US\$ 3.000-an, sedangkan negara maju berada diatas US\$ 12.000-an. "Bagaimana keluar



dari jebakan pendapatan menengah? Kita harus melakukan terobosan menggunakan *innovation driven economy*," ujar Hammam.

Saat ini Indonesia masih menggunakan *efficiency driven economy* sebagai basis bisnis biasa. Hal tersebut harus diterobos dengan *innovation driven economy*, yakni perekonomian dengan basis pemanfaatan teknologi agar bisa keluar dari *middle income trap*. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terlepas dari *middle income trap* dan menjadi negara maju melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

Pada kesempatan tersebut Hammam menjelaskan bahwa Indonesia harus meninggalkan paradigma lama yakni "iptek dikerjakan hanya untuk kemajuan iptek" dan menerapkan paradigma baru yakni

"iptek harus menjadi landasan untuk pembangunan nasional". Indonesia juga dinilai masih minim investasi untuk penelitian dan pengembangan, baik dari pihak pemerintah ataupun swasta.

Dalam membangun ekosistem inovasi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 BPPT menghadirkan *pentahelix*, yakni bersatunya unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Seminggu setelah kasus 01 dan 02 positif Covid-19 muncul di Indonesia, BPPT membentuk satuan tugas yang disebut *Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Covid-19 (TFRIC-19)*.

Hingga saat ini TFRIC-19 sudah menghasilkan 5 aksi cepat. Pertama *Artificial Intelligence Covid-19*, *mobile lab*, *PCR Diagnostic Test Covid-19*, *Non-PCR Diagnostic Test Covid-19*, dan *Whole Genome Covid-19 Origin Indonesia*.

# Komisi I DPR RI Apresiasi Kajian-kajian Lemhannas RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)



**K**omisi I DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lemhannas RI pada Selasa, (23/6) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI.

Dalam RDP tersebut, Lemhannas RI diminta menyampaikan program-program yang telah disusun dan berkaitan dengan tatanan normal kebaruan yang sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, sebagaimana telah disampaikan pemerintah bahwa tema kebijakan fiskal 2021 adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Tema tersebut selaras dengan RKP tahun 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Selain itu, terkait isu aktual Lemhannas RI sendiri, Komisi I DPR RI ingin mengetahui Kajian yang telah dilakukan terhadap masalah dan dampak pandemi Covid-19 yang telah memunculkan tatanan kehidupan kebaruan di masyarakat yang akan berevolusi ke kegiatan ekonomi, utamanya muncul budaya baru pada berbagai sendi kehidupan

bermasyarakat dan bernegara, tidak hanya untuk saat ini tetapi ketika pandemi Covid-19 ini berlalu.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo juga menyampaikan kegiatan-kegiatan Lemhannas RI yang telah dilakukan sampai semester pertama tahun 2020. Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional telah melaksanakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61 pada semester satu dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah (P3DA) yang akan direalisasikan pada semester dua.

Kemudian untuk Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan melaksanakan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Pelatihan untuk Pelatih (PUP) yang akan dilaksanakan pada semester dua dan Sosialisasi/Dialog Wawasan Kebangsaan. Selanjutnya, Kedeputian Pengkajian Strategik melaksanakan kegiatan Kajian Jangka Panjang yang masih dalam proses penyelesaian, dan *Quick Response* yang akan dilaksanakan di semester dua.

Untuk bidang Pengkajian, Lemhannas RI telah melakukan kajian yang membahas permasalahan nasional dalam bentuk kajian jangka panjang, kajian jangka menengah, *quick response*, dan jurpat. Untuk tahun anggaran 2020, Lemhannas RI telah dan akan melaksanakan empat Kajian Jangka Panjang dan empat Kajian *Quick Response*, meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial-Budaya dan Pertahanan Keamanan. Dua kajian telah dilaksanakan dan enam kajian dalam proses penyelesaian.

Wakil Ketua Komisi I DPRI RI, Teuku Riefky Harsya mewakili Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Lemhannas RI dalam beberapa kajian, untuk selanjutnya Komisi I DPR RI juga mendorong Lemhannas RI khususnya pada masa Tatanan Kehidupan Baru di era *new normal* pasca pandemi Covid-19 yang rekomendasinya menjadi rujukan kebijakan Pemerintah dalam menyiapkan kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa yang lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan.

# Alissa Wahid Memberikan Ceramah Kepada Peserta PPRA 61



**P**utri sulung Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, pada Rabu (24/6) secara daring melalui *video conference*.

Pada ceramah tersebut, Alissa mengangkat topik "Menakar Perkembangan Politik Identitas dan Pengaruhnya Terhadap Komitmen Pemimpin Nasional Untuk Menjaga Keutuhan NKRI".

Saat ini, tidak sedikit negara di dunia yang mengalami narasi identitas kelompok seperti di Banglades dan Kota Mandalay, Myanmar. Di Banglades yang menjadi target adalah umat Budha, karena adanya kelompok radikal Muslim yang sangat kuat. Sedangkan di Myanmar kaum ekstremis Budha menargetkan kaum Muslim yang merupakan minoritas.

"Persoalan identitas kelompok bukan hanya persoalan Indonesia, bukan hanya persoalan agama tertentu,

tetapi adalah persoalan global," ujar Alissa.

Menurut Alissa, identitas kelompok di Indonesia memang sangat mudah menyebar. Hal itu disebabkan karena banyak masyarakat Indonesia yang sosiosentris, yakni meletakkan kepentingan kelompok, identitas kelompok, agenda kelompok, serta aturan kelompok diatas aturan individu. "Karena sosiosentris, jadi mudah sekali menyulut identitas politik," tutur Alissa.

Secara umum identitas politik membawa aspirasi dan agenda politik kelompok, serta menggunakan identitas kelompok sebagai bahan bakar. Kemudian narasi-narasi yang digunakan adalah narasi kebencian, karena narasi kebencian dapat menggugah rasa terancam pada suatu kelompok.

Selanjutnya Alissa menjelaskan desentralisasi pemerintahan yang terkait dengan komitmen pemimpin, terutama pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal tersebut

membawa konsekuensi, yakni distribusi lokus perebutan kekuasaan politik berada di tingkat lokal yang membuat kontrak politik lebih terpusat di tingkat lokal. Selain itu, juga membuat adanya *pressure group* (kelompok penekan) berada di tingkat lokal dan mayoritarianisme juga ada di tingkat lokal.

Mengutip salah satu pernyataan Abdurrahman Wahid, Alissa menegaskan bahwa masalah di kehidupan sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukan mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan sebagai bangsa. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Indonesia diperlukan Pancasila sebagai asas dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. "Tanpa Pancasila, negara akan bubar," ujar Alissa.

# Agus Widjojo: Terus Bersikap Bijaksana dalam Menghadapi Situasi Pandemi Covid-19



**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi narasumber dalam acara Happy Parenting with Novita Tandry, pada Rabu (24/6).

Dalam acara tersebut, Agus Widjojo menjelaskan beberapa penyesuaian dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Lemhannas RI dikarenakan adanya pandemic Covid-19, salah satunya dengan melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. "Tadinya penyelenggaraan pendidikan, kegiatan proses belajar mengajar, diadakan tatap muka, sekarang dilaksanakan secara *online*," kata Agus.

Menurut Agus, hikmah yang dapat dipetik dengan adanya pandemi Covid-19 yakni memaksa seluruh elemen melakukan percepatan untuk

terbiasa dengan teknologi komunikasi dan melakukan banyak hal via daring. Lemhannas RI saat ini menyesuaikan metodologi pengajaran dan sarana prasarana teknologi. "Kita dipaksa untuk cepat berbenah untuk menyiapkan perlengkapan teknologi untuk dari *offline* menjadi *online*," ujar Agus.

Lebih lanjut, Novita menanyakan mengenai peran Agus sebagai seorang kakek dalam masa pandemi Covid-19. Agus menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini membuatnya kesulitan untuk bertemu langsung dengan kedua cucunya yang tinggal di Australia hingga satu tahun ke depan dan hanya dapat bertemu dengan salah satu cucunya yang tinggal bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kemudian Agus menyampaikan bahwa para orang dewasa perlu

menciptakan kegiatan bagi anak-anak yang dapat disesuaikan dengan keadaan saat ini karena anak-anak tidak dapat bersekolah secara langsung dan berinteraksi dengan teman-teman sekolahnya. "Kita pikirkan caranya bagaimana, walaupun tidak mungkin menggantikan (sekolah dan berinteraksi secara langsung dengan teman-sekolah)," kata Agus.

Agus menuturkan bahwa pandemi Covid-19 juga dapat menjadi sarana untuk membangun kedekatan hubungan orang tua dan anak serta dengan anggota keluarga yang lain. Agus juga berpesan kepada para orang tua untuk terus bersikap bijaksana dalam menghadapi situasi saat ini agar dapat terus memberikan contoh positif kepada anak-anaknya.

# Diskusi Panel Penguatan Integritas Pemimpin dalam Kehidupan Nasional



**K**etua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisararis Jenderal Polisi Drs. Firlil Bahuri, M.Si., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Tjahjo Kumolo, S.H., dan Wali Kota Surabaya Dr. (HC) Ir. Tri Rismaharini, M.T. menjadi narasumber dalam diskusi panel Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, pada Selasa (30/6) melalui *video conference*. Topik yang diangkat pada diskusi panel tersebut adalah "Penguatan Integritas Pemimpin dalam Kehidupan Nasional".

Pada diskusi panel tersebut Firlil mengatakan bahwa yang bisa menghentikan korupsi hanya integritas. "KPK berperan sentral dalam rangka memberantas tindak korupsi apa pun bentuknya," tutur Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firlil Bahuri, M.Si. mengawali ceramahnya.

Lebih lanjut Firlil menyampaikan bahwa KPK tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. KPK hanya bisa melakukan penegakan hukum melalui kewenangan KPK, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan putusan yang sudah tetap.

Firlil menilai bahwa cara untuk menghilangkan korupsi adalah dengan membangun integritas. Integritas bisa dimulai dari diri sendiri, unit kerja, satuan kerja, sampai tingkat lembaga. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata sebagai pimpinan, keseriusan membenahi sistem dan tata kelola, serta menerapkan penghargaan atas kinerja dan hukuman atas pelanggaran. "Untuk melawan korupsi tidak ada kata lain kecuali kita lawan dengan integritas" ujar Firlil.

Sependapat dengan Firlil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Tjahjo Kumolo, S.H. mengharapkan peserta PPRA 61 mampu membangun pola pikir yang komprehensif dan integral secara keseluruhan. "Diharapkan peserta mampu membangun pola pikir yang komprehensif integral secara keseluruhan," kata Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan bahwa salah satu visi misi Presiden Jokowi adalah melakukan reformasi birokrasi. Lebih mendalam konteksnya adalah penataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk mewujudkan ASN yang melayani masyarakat, ASN

yang mempercepat proses perijinan, ASN yang mempunyai integritas, dan ASN yang produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang melayani, yang lebih banyak mendengar, mau memahami orang lain dan berempati, mampu mengendalikan diri, mampu mengatasi keadaan, mampu mengatasi keadaan, mampu memegang amanah, dan peduli terhadap keselamatan rakyat.

Wali Kota Surabaya Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T. yang juga menjadi narasumber diskusi panel tersebut, menyampaikan bahwa saat ini fokusnya adalah membuat ASN bekerja seefektif dan seefisien mungkin dengan anggaran yang efektif dan efisien. "Itu memang sulit jika orang per orang memperbaikinya, maka yang dilakukan adalah membuat sistem," kata Risma.

Sistem yang dibuat juga untuk menghilangkan paradigma ASN bekerja mulai pukul 7, hasil 0, dan pulang pukul 2. Risma membuat sistem pengelolaan yang memaksa ASN harus bekerja dengan membuahkan hasil dan bisa langsung dikontrol. Beberapa contoh sistemnya adalah sistem pengelolaan keuangan daerah, *e-sdm*, *e-monitoring*, *e-education*, dan *e-health*.

# Ketua Komnas HAM Memberikan Ceramah Kepada Peserta PPRA 60



## Hak dapat dibatasi dengan catatan ada keadaan darurat

**Ahmad Taufan Damanik**  
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

dikurangi, namun bukan dicabut. Salah satu contohnya adalah pemberlakuan PSBB yang membatasi hak bergerak masyarakat. Contoh lainnya adalah pembatasan hak berkomunikasi dalam situasi perang atau situasi darurat militer.

“Hak dapat dibatasi dengan catatan ada keadaan darurat,” ujar Ahmad. Kemudian HAM dimungkinkan untuk ditunda, dibatasi, dan dikurangi jika ada dasar hukum yang digunakan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, lanjut Ahmad, terdapat hak yang tidak dapat dikurangi yaitu *non-derogable rights*. Hak yang termasuk *non-derogable rights* adalah hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

“Maka Komnas HAM selalu menolak hukuman mati karena berdasarkan prinsip ini,” tegas Ahmad menjelaskan mengenai hak untuk hidup sebagai *non-derogable rights*. Setiap individu juga memiliki hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani dengan diperbolehkan meyakini apapun dengan tetap menaati regulasi yang berlaku.

**K**etua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, Rabu (1/7) melalui *video conference*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Y.M.E dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.

Berdasarkan UU RI No 39/1999 itulah, Ahmad menjelaskan bahwa HAM melindungi individu dan menjaga agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan

yang menimbulkan ketidakadilan, kekerasan, eksploitasi kepada rakyat. Konsep HAM, jelas Ahmad, baru muncul tahun 1948, namun ide-ide HAM sudah ada sebelumnya seperti yang tertuang pada UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat, berekspresi, dan kebebasan menjalankan agama. Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang progresif dalam isu HAM.

“Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang paling progresif untuk memasukkan isu HAM ke dalam perundang-undangan atau sistem hukum,” kata Ahmad. Di Indonesia ketentuan-ketentuan mengenai HAM diatur hingga tingkat operasional seperti peraturan kapolri dan peraturan panglima TNI yang mengatur aparaturnya yang bekerja dengan standar HAM.

Kemudian Ahmad menjelaskan mengenai *derogable* dan *non-derogable rights*. *Derogable rights* adalah hak asasi yang bisa ditunda, dibatasi, dan



# Penandatanganan Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan SGPP

Lemhannas RI dan *School of Government and Public Policy* (SGPP) Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman, pada Rabu, (1/7) di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

Nota Kesepahaman tersebut merupakan nota kesepahaman pertama antara kedua instansi yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan kedua instansi.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Ketua SGPP Indonesia Safendri Komara Ragamustari, Ph.D. menandatangani nota kesepahaman tersebut. Nota kesepahaman tersebut untuk meningkatkan hubungan

kelembagaan antara kedua instansi.

Adapun ruang lingkup adalah peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran tenaga ahli dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Dilaksanakan di masa tatanan normal baru, penandatanganan nota kesepahaman tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan seperti hanya disaksikan oleh beberapa perwakilan jajaran Lemhannas RI dan SGPP Indonesia, menerapkan jarak antar tamu



undangan, diharuskan menggunakan masker, dilakukan dalam waktu singkat, dan diwajibkan mencuci tangan setelah acara selesai.

## Penyelenggaraan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 60 Lemhannas RI Secara Virtual



Menjelang berakhirnya Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, Lemhannas RI mengadakan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 60 yang diikuti 97 orang yang terdiri dari 87 istri dan 10 suami,

selama 5 hari mulai Kamis, 16 Juli 2020 hingga Rabu 22 Juli 2020 secara virtual.

"Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 60 Lemhannas RI kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya, karena diselenggarakan secara virtual dan dilaksanakan di tempat masing-masing," kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya pada Upacara Pembukaan Tar Istri/Suami Peserta PPRA 60, pada Kamis, (16/07).

Tujuan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 60 adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan cakrawala pandang para istri/suami agar sejalan dengan semakin berkembangnya wawasan dan pengetahuan serta cakrawala pandang para peserta PPRA 60 setelah mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.

Selain itu, tujuan lainnya adalah mempererat nilai kekeluargaan di antara sesama istri/suami peserta termasuk dengan personel organik Lemhannas RI. "Keakraban dan saling mengenal yang dilandasi dengan ikatan batin yang kokoh diharapkan dapat menjadi wahana terciptanya iklim persahabatan yang kondusif bagi pelaksanaan tugas maupun secara pribadi di masa mendatang," ujar Agus.

# Menteri PPN/Kepala Bappenas Memberikan Ceramah kepada Peserta PPRA 61



**M**enteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa memberikan ceramah kepada peserta PPRA 61, pada Selasa (7/7) secara dalam jaringan (daring) melalui aplikasi *video coference*.

Dalam ceramahnya Suharso menyampaikan bahwa RPJMN sebenarnya merupakan perintah dari Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Oleh karena itu, Suharso mengatakan bahwa setiap kepala pemerintahan meletakkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang konvergen dengan sasaran di dalam RPJP.

RPJMN, lanjut Suharso, antara lain diisi juga oleh visi, misi, serta arahan presiden. Pada masa Presiden

Jokowi, RPJMN dituangkan dalam 7 agenda pembangunan. Pertama adalah transformasi ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, yakni dengan rata-rata pertumbuhan 6% per tahun. Kedua, pengembangan wilayah sebagai basis pembangunan untuk mengurangi kesenjangan. Ketiga, yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing, hal ini penting karena untuk memasuki era Revolusi Industri 4.0 dibutuhkan tenaga kerja yang kualifikasinya berbeda dengan sekarang dan kualifikasinya patut disiapkan.

Keempat adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dalam hal ini sikap intoleran dan ingin menang sendiri harus dihilangkan. Kelima, yaitu pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi. Keenam adalah memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup dan kerentanan bencana,

termasuk bencana non-alam seperti pandemi Covid-19.

Terakhir adalah kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta stabilitas politik dan pertahanan keamanan. "Semua agenda pembangunan itu memuat 17 *Sustainable Development Goals*," kata Suharso. Saat ini *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi ukuran sebuah bangsa maju atau tidak. "Kementerian PPN/Bappenas adalah pengampu wali amanat untuk SDGs tersebut," jelas Suharso.

Pada ceramah tersebut, Suharso juga menyampaikan lima fokus strategi untuk sasaran 2024. Fokus pertama adalah pembangunan SDM yaitu melalui layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan penguatan karakter. Kemudian pembangunan infrastruktur mulai dari infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, energi dan kelistrikan sampai transformasi digital. Selanjutnya adalah penyederhanaan regulasi yang akan disusun berdasarkan analisis dampak regulasi serta analisis biaya dan manfaat.

Fokus lainnya adalah penyederhanaan birokrasi dengan penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan *e-government* sehingga pelayanan tidak terhambat jarak. Terakhir adalah transformasi ekonomi dengan industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global, pengembangan destinasi unggulan, serta penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

# Wakil Presiden RI Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin Beri Kuliah Umum Peserta PPRA 60 dan 61 Lemhannas RI

**W**akil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin memberikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61, pada Kamis, (9/7) secara dalam jaringan (daring) melalui aplikasi *video coference*.

Pada kuliah umum tersebut, KH. Ma'ruf Amin membahas mengenai dua tema seminar dari peserta PPRA 60 dan 61 yakni "Revitalisasi BUMN untuk Kesejahteraan Masyarakat" dan "Nasionalisme di Era Global dan Pemahaman Kebangsaan". K. H. Ma'ruf Amin menganggap kedua tema tersebut sangat relevan dengan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini.

K. H. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa BUMN dibentuk dengan tujuan utama memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara serta memberikan kemanfaatan melalui layanan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, namun menurut Kementerian BUMN jumlah dan cakupan bidang tersebut terlalu besar dan luas sehingga perlu dikurangi dan dirampingkan sesuai dengan *line of business* dan kebutuhan pembangunan agar lebih efisien, kompetitif, dan memberikan hasil yang lebih baik.

Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu respons pemerintah dalam menghadapi persaingan global sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. "Sesuai dengan tujuan pembentukannya, diharapkan BUMN ke depan akan lebih mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional termasuk dalam turut serta membesarkan UMKM," ujar K. H. Ma'ruf Amin.



Selanjutnya K. H. Ma'ruf Amin membahas mengenai tema kedua, yaitu "Nasionalisme di Era Global dan Pemahaman Kebangsaan". Menurut K. H. Ma'ruf Amin, nasionalisme pada intinya adalah kesadaran dan rasa cinta tanah air. Sementara globalisasi saat ini adalah suatu keniscayaan dan bukan lagi suatu pilihan. Globalisasi memang dimulai sejak adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia membangun hubungan tanpa dibatasi jarak dan waktu serta dapat melakukan berbagai hal secara virtual yang tidak menuntut kehadiran fisik.

Dengan teknologi internet, siapa pun dapat mengunduh dan mengunggah informasi serta bertransaksi tanpa batas ruang dan waktu. Tetapi, pada saat yang sama para pelaku kejahatan juga menikmati keleluasaan itu seperti untuk memperdagangkan narkoba, menyebar paham radikalisme, dan terorisme. "Jadi globalisasi tidak hanya membuka peluang bagi kemajuan dan

manfaat, tetapi juga tantangan dan ancaman," lanjut K. H. Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, nasionalisme dan rasa cinta tanah air generasi muda tidak cukup dipupuk dengan cara-cara lama, melainkan harus mampu diberikan pengertian nasionalisme yang kontekstual, yang memberikan pemahaman tentang jati diri dan semangat kebangsaan yang tidak saja kokoh memegang prinsip, tapi sekaligus juga menghargai perbedaan dan pentingnya kolaborasi antarbangsa. "Dalam konteks globalisasi, nasionalisme harus ditampilkan bukan lagi dengan semangat primordial yang sempit, tetapi dengan kemampuan berkompetisi yang mumpuni. "Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa nasionalisme di era globalisasi akan secara alami terkikis dan menipis bila suatu bangsa tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi," kata K. H. Ma'ruf Amin.



**Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI**

Penanggung Jawab: **Sugeng Santoso** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Pembuat Artikel: **Naomi Augustina** Penerjemah: **Magista Dian Fitrilia**

Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**

Sekretariat: **Irina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,**

**Gatot, Yatik Wulandari, Yusradi**

Alamat Redaksi:

**Biro Humas Settama Lemhannas RI**, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <https://www.lemhannas.go.id>